

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah lahir saat terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 juga mengakibatkan beberapa faktor internal maupun faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh timbulnya tuntutan atas buruknya mekanisme pemerintahan secara sentralistik, dimana terdapat adanya kesenjangan dan ketimpangan pembangunan antara daerah dengan yang ada wilayah pusat serta menganggap kurang pentingnya pembangunan daerah. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh dorongan internasional untuk menguatkan investasi di Indonesia. Otonomi daerah menjadi solusi terbaik menjawab permasalahan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan ditunjang dengan keuangan memadai.

Otonomi daerah yang disebut solusi terbaik untuk menunjang pembangunan dan keuangan daerah dengan desentralisasi pemerintah guna untuk mengelola dan mengatur pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dikenal dengan Pendapatan Asli daerah (PAD) yang tidak lebih komponennya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan juga adapun melihat rasio kinerja di APBD, semakin daerah tidak memakai dana APBN yang di berikan atau anggaran maka menunjukkan kecil ketergantungan pada pemerintah pada pemerintah pusat.

Otonomi daerah memastikan bahwa masing – masing pemerintah daerah dituntut untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD bisa berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang telah dipisahkan, dan pendapatan lain yang berasal dari daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada setiap daerah dalam menggali pendanaan yang berasal dari daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Namun kenyataannya masih banyak daerah yang mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Hal tersebut terjadi karena banyak daerah yang tidak menyadari potensi dari sektor-sektor PAD yang ada di daerah mereka dan tidak menjadikan daerah mereka sebagai daerah potensial sumber PAD.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Banyuwangi memiliki wewenang dan hak dalam mengatur sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Sebagai daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Kabupaten Banyuwangi mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah melalui dana dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan pendapatan asli lainnya yang sah. Dan dianggap berhasil secara optimal dalam

melaksanakan pengelolaan potensi daerah untuk memperoleh tambahan pembiayaan pembangunan.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang sedang berkembang dan bertumbuh. Terdapat banyak sekali hal yang mendorong perekonomian antara lain dari industri perakita kapal militer, pertambangan emas gunung tumpang pitu, dan banyak potensi dalam bidang kepariwisataannya. Upaya dalam pemungutan sumber-sumber potensi pajak dan retribusi tersebut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, “perekonomian Banyuwangi yang meningkat belum diiringi dengan pendapatan daerah yang signifikan khususnya dari sektor pajak. Mekanisme daerah terus berupaya untuk mencari jalan meningkatkan pendapatan dengan mengajukan perubahan Perda No. 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah”. Dalam materi perubahan ini, diantaranya mengubah istilah objek pajak hiburan yang antara lain mencakup tontonan film, pegelaran musik, karaoke keluarga, sirkus, spa dan pusat kebugaran (banyuwangikab.go.id, 2018).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nizar, (2016) meneliti tentang “tingkat keberhasilan penerimaan pajak daerah ditinjau dari efektivitasnya, kontribusi dan pertumbuhan pada pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi”. Hasil yang didapat dengan melakukan analisis tingkat efektivitas pajak daerah sudah menunjukkan hasil yang sangat efektif, analisis kontribusi pajak daerah telah memberikan kemampuan kontribusi yang belum baik sedangkan analisis laju pertumbuhan pajak daerah mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian ini dengan tujuan melengkapi penelitian sebelumnya yaitu menganalisis pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan perhitungan efektivitas, kontribusi dan pertumbuhan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemungutan Pajak Daerah. Perbedaan penelitian ini yaitu Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti merasa perlu menganalisis efektivitas, kontribusi dan pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah yang khususnya dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai sumber pendapatan. Maka judul penelitian ini adalah **“Analisis Efektif, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2015-2019?
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2015-2019?
3. Bagaimana Laju Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2015-2019.

2. Menganalisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2015-2019.
3. Menganalisis Laju Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2015-2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini di harapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi bapenda untuk nilai tingkat efektivitas, kontribusi dan pertumbuhan penerimaan pajak daerah.
2. Dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti setelah penelitian ini berlangsung, dan memungkinkan penelitian ini masih ada kekurangan yang perlu di teliti kembali.
3. Sumbangan dalam pengembangan ilmu pegetahuna di bidang perpajakan khususnya implemetasi teori di lapangan yang berkaitan pajak daerah.